

Antara Netralitas dan Keberpihakan: Palang Merah di Jawa pada Masa Perang (1945–1949)

RIZKY EKA SAPUTRA

Arsip Nasional Republik Indonesia
Email: rizky.saputra@anri.go.id

Abstract

This research discusses about the role PMI (Indonesian Red Cross) and NERKAI (*Nederlandsche Roode Kruis afdeeling Indonesië*) in Java during Indonesian Independence War 1945-1949. As one of the most important institutions in wartime, the Indonesian Red Cross (PMI and NERKAI) was in a dilemmatic position. They had to obey the state for which they served, but on the other hand, they had to adhere to the fundamental principle of the International Red Cross. These dual functions have to be carried by the two Red Cross organizations, led them to abandon their neutrality. This study was designed to explain the reason why the two Red Cross organizations involved in the Indonesian Independence War abandoning their neutrality principle. This research found out, at least, four factors influenced the partiality actions of the Red Cross, *first*, the special status of the Red Cross in wartime; *second*, the unclear definitions of “Red Cross independent”; *third*, sentiment of the Indonesian nationalism; and *fourth*, the presence of militarism in the Red Cross.

Keywords:

Indonesian
Independence
War;
NERKAI;
neutrality;
PMI; Red
Cross

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kiprah Palang Merah Indonesia (PMI) dan *Nederlandsche Roode Kruis afdeeling Indonesië* (NERKAI) di Jawa selama Perang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, baik di medan pertempuran, maupun di luar medan pertempuran. Sebagai salah satu lembaga yang paling dibutuhkan selama periode perang, PMI dan NERKAI berada dalam posisi yang dilematik. Di satu sisi mereka harus tunduk pada pemerintahan yang menaunginya, di sisi yang lain mereka harus taat pada prinsip dasar gerakan Palang Merah Internasional. Tanggung jawab ganda yang dibebankan kepada kedua Palang Merah mengakibatkan mereka tidak dapat bekerja secara netral. Penelitian diarahkan untuk menjawab permasalahan mengapa kedua lembaga Palang Merah tidak dapat bekerja secara netral. Dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia, penelitian ini menemukan empat faktor yang mendorong sikap keberpihakan PMI dan NERKAI; pertama, status istimewa Palang Merah; kedua, kaburnya prinsip independen Palang Merah; ketiga, sentimen nasionalisme Indonesia; dan keempat, pengaruh militerisme Palang Merah.

Kata Kunci:

NERKAI;
netralitas;
Palang
Merah;
Perang
Kemerdekaan
Indonesia;
PMI

Pengantar

Sejarah Revolusi Indonesia merupakan salah satu periode yang banyak mendapatkan perhatian dari para sejarawan yang mengkaji Indonesia. Permasalahan pokok dari periode ini adalah pergantian kekuasaan dari negara kolonial menjadi negara republik. Dari beberapa penelitian, aspek politik dan militer sering dijadikan sebagai fokus utama pembahasan mereka. Dominannya kajian sejarah politik-militer menciptakan celah dalam penulisan historiografi Indonesia, di mana kajian-kajian sejarah lain selama periode tersebut menjadi terabaikan. Untuk melengkapi “puzzle” yang kosong tersebut, penulis terdorong untuk menuliskan sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia yang dilihat dari dimensi pelayanan kesehatan, dengan fokus pada kiprah Palang Merah di Jawa.

Ide awal pembentukan lembaga Palang Merah adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masa perang. Lembaga tersebut berusaha menunjukkan bahwa peperangan harus tetap mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan tanpa diskriminasi. Pada masa kolonial, Lembaga Palang Merah yang bertugas di Hindia Belanda bernama NIRK (*Nerderlandsch Indische Roode Kruis*). Menurut studi yang dilakukan Van Bergen, pekerjaan NIRK masa kolonial memiliki dua pola, (Van Bergen, 2014). Hal tersebut selaras dengan laporan aktivis NIRK, Von Roemer yang mencatat bahwa sejak tahun 1915 NIRK banyak terlibat dalam pekerjaan sosial, pemberian vaksin, pemberantasan wabah, dan kampanye anti-opium (Von Roemer, 1922: 1-4). Dalam hal ini, bantuan sosial Palang Merah dapat dipahami sebagai media pengikat loyalitas pribumi terhadap negara kolonial.

Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik menciptakan kondisi *vacuum of power* di Indonesia. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Republik untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Di pihak lain, Belanda terdorong untuk menegakkan kembali kekuasaan di bekas wilayah koloninya. Kondisi peperangan yang tercipta akibat perebutan kedaulatan di Indonesia memunculkan konflik berdarah yang sulit diselesaikan. Dalam kondisi konflik tersebut, Palang Merah “hidup kembali” dengan mengusung prinsip netralitas Konvensi Jenewa. Berdasarkan pembacaan berbagai sumber dan literatur, sedikitnya terdapat dua lembaga Palang Merah yang bekerja di Indonesia pada masa Revolusi, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI), *Nederlandse Indie Roode Kruis* (NIRK) yang kemudian berubah nama menjadi *Nederlandse Roode Kruis afd. Indonesië* (NERKAI).

Kedua lembaga Palang Merah dituntut untuk siap siaga di berbagai wilayah rawan, baik di *front* pertempuran dan di luar *front* pertempuran. Kiprah mereka selama periode Perang Kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan fungsi medis, tetapi juga fungsi politis, di antaranya; spionase; propaganda, dan alat diplomasi; yang tentu saja memperkuat posisi masing-masing pemerintahan yang sedang bertikai. Berdasarkan latar Belakang di

atas, maka studi ini merumuskan sebuah pertanyaan utama, yaitu mengapa PMI dan NERKAI bersedia memainkan peran ganda di luar tugas utama Palang Merah? Penelitian ini melakukan pembatasan ruang lingkup dalam dua cakupan, yaitu cakupan temporal dibatasi antara tahun 1945-1949, sedangkan cakupan spasial penelitian ini adalah Pulau Jawa dengan mengambil beberapa contoh peristiwa di berbagai daerah yang mungkin tidak akan dapat mewakili seluruh wilayah Jawa.

Palang Merah masa Perang Dunia II

Persiapan Palang Merah Menjelang Masa Perang di Hindia Belanda, 1940-1942

Sejak menyerahnya kerajaan Belanda akibat invasi Jerman tanggal 10 Mei 1940, pemerintah kolonial mulai bersikap waspada terhadap kemungkinan serangan mendadak orang-orang Jerman di Hindia Belanda. Berbagai tindakan pengamanan dilakukan, di antaranya menyabotase kawat yang berasal dari Berlin, mengamankan kapal dagang Jerman, hingga menginternir orang-orang Jerman yang berada di Hindia Belanda (Onghokham, 2014: 1-8). Kebijakan yang disebutkan paling akhir segera mendapatkan perhatian dari ICRC. Melalui *Dutch Section*, mereka segera mendapat izin untuk mengirim perwakilannya guna mengunjungi orang-orang Jerman dan Italia yang diinternir di Hindia Belanda (ICRC, 1948: 501). Berdasarkan catatan De Jong, terdapat 2.800 orang yang diinternir di Hindia Belanda, mereka terdiri dari warga negara Jerman, Italia, golongan Yahudi, dan anggota-anggota *Nationaal-Socialistische Beweging* (NSB). Mereka diinternir di Benteng Van den Bosch di Ngawi, Ambarawa, dan Pulau Onrust di utara Batavia (De Jong, 2002: 27-29). Selain kewaspadaan terhadap Jerman, antara bulan Mei 1940 hingga 5 Desember 1941 pemerintah Hindia Belanda sudah intens memantau aktivitas Jepang, meskipun mereka belum menyatakan perang terhadapnya.

Sebagai lembaga kemanusiaan, NIRK segera merespons kekhawatiran pemerintah kolonial melalui simulasi perang dan pelatihan *Eerste Hulp Bij Ongelukken* (EHBO). Hal tersebut dilakukan dalam rangka pertahanan semesta dan mengatasi kekurangan sukarelawan Palang Merah. Sebagai contoh di Solo, pada tahun 1941 dr. Kartono Martosoewignjo membentuk 4 *mobiele-colonnes* NIRK. Dalam melaksanakan tugas di masa perang, NIRK ditugaskan untuk mengevakuasi korban dari *veldlazaretten* (Rumah sakit darurat) ke Rumah Sakit, sedangkan MGD ditugaskan mengevakuasi korban dari medan perang. Selain itu, pada tanggal 25-27 Februari 1941, NIRK juga bekerja sama dengan LBD (*Luchtbeschermingsdienst*) mengadakan kursus EHBO dan pelaksanaan simulasi serangan udara. Adapun tugas LBD difokuskan untuk perlindungan keselamatan penduduk, sedangkan NIRK difokuskan untuk pertolongan bagi tentara yang terluka (Roode Kruis Week, 1941). Pelatihan serupa banyak dilakukan menjelang berakhirnya masa kolonial.

Usaha Pertolongan pada Masa Penjajahan Jepang, 1942 – 1945

Paska kemenangan kilat pasukan Jepang atas Belanda, Pemerintah Militer Jepang melakukan “pembersihan” segala hal yang berhubungan dengan Belanda, mulai dari penggantian nama jalan, pelarangan menggunakan bahasa Belanda, hingga melakukan interniran terhadap orang Belanda dan Eropa lainnya, termasuk KNIL. Pemerintah Jepang mengambil sikap tegas untuk melarang aktivitas organisasi Palang Merah. Nasib serupa juga dialami organisasi kepanduan yang selama masa kolonial aktif mengajarkan EHBO (Suara Tjabang PMI tjabang Djakarta, Juli 1953: 18).

Pada akhir 1942 NIRK mendirikan Komite Pusat Palang Merah Hindia Belanda di London. Tidak berselang lama, NIRK-London meminta bantuan ICRC Jenewa, Swiss dan Swedia memperoleh persetujuan dari pemerintah militer Jepang untuk memberikan bantuan bagi interniran yang berada di Jawa. Dalam pelaksanaannya, bantuan hanya dapat dilakukan momen tertentu saja, misalnya Natal dan Tahun Baru (ICRC, 1948: 501-502). Namun demikian, kelonggaran yang diberikan militer Jepang tidak bertahan lama. Pada bulan Agustus 1943 Jepang memblokir semua surat untuk interniran, begitu juga penutupan bantuan yang telah dilakukan sebelumnya. Kondisi tersebut bertahan hingga berakhirnya perang, bantuan yang diberikan organisasi Palang Merah tidak pernah sampai ke kamp.¹

Pada tahun 1945, posisi Jepang dalam peperangan mulai mengalami kemunduran. Melalui Konferensi bulan Maret 1945, NIRK-Melbourne menuntut kepada pemerintah Belanda agar melakukan rehabilitasi internir dan tawanan perang di Hindia Belanda. Hasilnya, pada Juli 1945 dibentuk *Oost Indië Kamer van het Nederlands Rode Kruis* di Melbourne, dengan tujuan pembebasan dan kebangkitan Hindia Belanda. Dalam hal ini, NIRK ditugaskan mempersiapkan sukarelawan medis terlatih dan melengkapi peralatan medis, mengirimkan bantuan ke bekas Hindia Belanda, membentuk pelayanan informasi, menjalin kontak dengan Jenewa dan sekutu, serta membangun kembali Palang Merah Hindia Belanda.²

Dari pihak Indonesia, pelayanan kesehatan di luar kamp interniran diambil alih oleh dokter pribumi. Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, pemerintah Jepang memerintahkan untuk membuka kembali sekolah kedokteran di Jakarta, dengan nama *Ikadaigaku*. Dalam perkembangannya, beberapa mahasiswa Ikadaigaku direkrut menjadi anggota PETA, yang kemudian menjadi dokter tentara nasional (Mona Lohanda, 1986: 65-67).

Sejak pertengahan 1943 hingga 1945, kekuatan militer Amerika di

1) 'Het N.I. Rode Kruis tijdens de bezetting van Indonesië door Japan, tanggal 7 Januari 1949: 2-3, ANRI, Jakarta, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1717.

2) 'Het N.I. Rode Kruis tijdens de bezetting van Indonesië door Japan, tanggal 7 Januari 1949: 3-4, ANRI, Jakarta, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1717.

Pasifik mulai membuat Jepang tertekan. Hal tersebut memberi kesempatan kepada laskar-laskar untuk mengasah keterampilan militer dan pelatihan EHBO, tentu saja atas persetujuan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang melalui Tonarigumi, Pejabat Kesehatan Si dan tenaga pendidik memberikan pelatihan EHBO dan perlindungan serangan udara kepada penduduk Indonesia. Pada tahun yang sama, PETA (Pembela Tanah Air), *Funjinkai* dan Barisan Srikandi dimobilisasi untuk memberikan pelatihan kemiliteran dan EHBO (Djawa Baroe E8; E12; E15; E17; dan E19, 2604). Selain itu, beberapa bekas murid HIS yang dirasa memiliki kemampuan kepalangmerahan ditempatkan di berbagai rumah sakit. Sebagai contoh, Rumah Sakit Banyuasih Purwakarta yang memiliki unit Palang Merah yang diorganisir oleh Dokter Hardjolukito.

Periode akhir kolonial hingga masa penjajahan Jepang merupakan fase penting dan menentukan bagi perjalanan Palang Merah di Indonesia. Berbagai pelatihan EHBO yang diberikan NIRK maupun organisasi bentukan Jepang menjadi modal menghadapi Perang Kemerdekaan Indonesia yang tidak lama lagi segera meletus. Selain itu, kedekatan PETA dengan beberapa dokter, yang di kemudian hari menjadi tokoh PMI, seperti dr. Bahder Djohan, dr. Hardjolukito, serta dr. Satrio, berpotensi mempengaruhi pola mobilisasi PMI di medan pertempuran Revolusi Indonesia.

Palang Merah Indonesia (PMI)

Setelah menyerahnya Jepang, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka, cita-cita untuk mendirikan lembaga Palang Merah-mandiri kembali didiskusikan. Ide ini merupakan kelanjutan dari gagasan dr. Senduk dan dr. Bahder Djohan untuk membentuk sebuah lembaga Palang Merah khusus pribumi. Empat hari setelah Soekarno dan Hatta dikukuhkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Menteri Kesehatan RI yaitu Boentaran Martoatmodjo diperintahkan untuk membentuk sebuah Palang Merah Nasional. Perintah tersebut segera ditindaklanjuti dengan membentuk Komite Eksekutif yang terdiri dari dr. R. Mochtar sebagai Ketua, dr. Bahder Djohan sebagai Penulis, dan dr. Djoehana, dr. Marzuki, dan dr. Sitanala sebagai Anggota (PMI, 1953: 1). Pada tanggal 15 September 1945, Komite Eksekutif merumuskan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh PMI, di antaranya:

- Menyusun anggaran dasar menurut dasar-dasar Internasional.
- Menjalin hubungan dengan badan-badan informasi yang telah ada, seperti Djawa *Izi Hookoo Kai*, Panitia Nasional Poesat, Fonds Kemerdekaan, Wakil-wakil Palang Merah Internasional, Palang Merah Negara Sekutu, Palang Merah Belanda (NRK), serta orang-orang terkemuka dari pelbagai lapisan.
- Membantu mendirikan cabang-cabang PMI.

- Mengadakan rancangan dan usulan tentang penyusunan Pusat Panitia Palang Merah Indonesia. (Soeara Merdeka, 25 Agustus 1945: 1)

Selain itu, Komite Eksekutif juga menyusun Panitia Besar Palang Merah Indonesia. Ditunjuk sebagai ketua adalah Moh. Hatta dan R. Boentaran Martoadmodjo sebagai wakilnya. Mereka dilantik secara resmi pada tanggal 17 September 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Adapun pengurus besar Palang Merah Indonesia adalah:

Ketua : Drs. Moh. Hatta
Wakil : dr. Boentaran Martoatmadja
Sekretaris : dr. Bahder Djohan dan dr. R. Mochtar
Anggota : Mr. Soebardjo; Mr. Maramis; Ir. Soerachman; R.A.A. Wiranatakoesoemah; Prof. Mr. dr. Soepomo; Mr. Iwa Koesoema-sumantri; Mr. Kasan Singodimedjo; R. Soewirjo; dr. Slamet Soedibjo; Prof. dr. Sorwono; dr. R. Kadijat; dr. A. Rasjid; dr. Soerono; dr. Moch. Djoeana; A.M. Dasaad; Djohan Djohor; Wahid; Rachman Tamin; Soeprapto; Oentoeng Laksono; Mr. Palenkahu; dr. Hanafiah; dr. Marzoeki. (PMI, 1953: 2)

Berdirinya Palang Merah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks nasionalisme bangsa Indonesia. Keterlibatan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dalam susunan panitia PMI berpotensi menyulitkan posisi kenetralan dan prinsip apolitis PMI sebuah lembaga Palang Merah. Sebut saja ketua PMI, Moh. Hatta, yang waktu itu sudah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Boentaran Martoatmadja, yang merupakan Menteri Kesehatan RI ditunjuk ditetapkan sebagai wakil ketua PMI. Keduanya termasuk tokoh yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam tubuh PPKI (Marwati Djoened, 2008: 136-151).

Apabila ditarik ke belakang, ide untuk membentuk PMI merupakan pengaruh dari gerakan kebangsaan awal abad 20. Pelopornya adalah RCL Senduk dan Bahder Djohan, dua pemuda lulusan STOVIA yang menjadi anggota kongres Sumpah Pemuda 1928. RCL Senduk sebagai perwakilan Jong Celebes dan Bahder Djohan yang mewakili Jong Sumatra Bond sama-sama memiliki ide persatuan Indonesia (Leirissa dkk, 1989: 22 dan 71). Sebagai lulusan sekolah kedokteran yang memahami pentingnya kesadaran kebangsaan, isu kesehatan menjadi isu utama yang harus mereka perhatikan. Tidak mengherankan jika kemudian mereka berdua mencetuskan gagasan pendirian Palang Merah khusus pribumi pada tahun 1932. Ide tersebut diutarakan sebagai respons terhadap absennya pemerintah kolonial dalam memperbaiki kesehatan pribumi. Sayangnya, ide tersebut tidak pernah disetujui Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, pengakuan internasional merupakan syarat mutlak yang harus didapatkan oleh Indonesia. Pada masa itu, hubungan diplomatik dengan dunia luar dirasa belum memungkinkan untuk dilakukan, karena dunia Internasional masih menganggap Belanda yang berdaulat di wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Hal tersebut membuka peluang bagi Palang Merah Indonesia untuk tampil mewakili Republik dalam sebagai organisasi yang dapat diakui internasional. Sebagai organisasi yang paling dibutuhkan masa perang, PMI berpotensi menjadi agen diplomasi pemerintah Republik untuk memperoleh legitimasi sebagai negara yang berdaulat.

Perlu diberikan catatan bahwa dua bulan setelah didirikan, PMI mendapatkan pengakuan Internasional. Dalam pertempuran 10 November 1945 Surabaya, ICRC (*International of the Red Cross Committee*) sebagai otoritas tertinggi Palang Merah Internasional meminta bantuan kepada PMI untuk melakukan pekerjaan di *front*. Berdasarkan catatan resmi PMI, surat permintaan bantuan dari ICRC dialamatkan kepada "*To the Headoffice of PMI*" (PMI, 1953: 5). Peristiwa tersebut merupakan perkembangan yang menggembirakan bagi PMI dan pemerintah Indonesia. Meskipun pemerintahan Republik belum mendapatkan pengakuan secara internasional, tetapi lembaga yang mereka bentuk telah diakui eksistensinya oleh organisasi internasional.

PMI merupakan lembaga kemanusiaan yang selama proses berdirinya sulit dilepaskan dari unsur politik. Di satu sisi, PMI merupakan lembaga bantuan kemanusiaan yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia pasca Perang Dunia II, di sisi yang lain PMI menjadi alat legitimasi Indonesia sebuah negara yang berdaulat. Proses berdirinya PMI merupakan hasil dari kesadaran kebangsaan Indonesia yang telah berlangsung sejak awal abad 20. Melalui PMI, orang Indonesia dapat menunjukkan bahwa orang Indonesia setara dengan orang Belanda dalam memahami apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut sekaligus mematahkan anggapan orang Belanda yang menyatakan bahwa pribumi tidak mampu mengorganisir sebuah badan kemanusiaan yang mandiri.

Pembentukan kembali Palang Merah Hindia Belanda (NIRK)

Setelah Jepang menyerah, orang Eropa bergerak cepat dalam memberikan pertolongan kepada korban perang, khususnya Interniran. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. Willekens S.J., menginisiasi pembentukan lembaga sukarela untuk mengorganisir bantuan suplai makanan. Tujuan lain pembentukan lembaga ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang internir di Batavia, seperti yang pernah dia lakukan hingga bulan April 1944. Willekens berpendapat bahwa bantuan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip Palang Merah Internasional, sehingga dapat

menghindari penyalahgunaan kepentingan politik dan militer. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Willekens berhasil membentuk “rintisan” Palang Merah di Batavia. Sayangnya, beberapa anggotanya diculik dan dibunuh Pemuda.³ Pada tanggal 1 September 1945, Weidman sebagai perwakilan Palang Merah Internasional mengusahakan agar pekerjaan Palang Merah di Batavia segera diakui. Tiga minggu kemudian usaha tersebut berhasil, pemerintah Sekutu mengakui Palang Merah di Batavia (Rode Kruis Batavia, 1945: 1-2).

Di pihak yang lain, Perwakilan Pemerintah Belanda di Melbourne melihat peluang untuk kembali masuk kembali ke Indonesia melalui Palang Merah Belanda (*Nederlands Rode Kruis* - NRK). Sama halnya Palang Merah Batavia, fokus utama pekerjaan mereka adalah memberikan bantuan kepada orang Belanda yang menjadi internir, tawanan perang, dan *Romusha*. Pada bulan September 1945, *Oost Indies Kamer* (OIK) Melbourne membentuk sebuah tim yang terdiri dari 30-40 orang untuk dikirimkan ke Indonesia. Mereka masuk ke dalam tubuh *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA), menggunakan seragam NICA, tetapi bekerja untuk NRK. Mereka memberikan informasi kepada NRK mengenai segala hal tentang Indonesia, sekaligus menyarankan pembentukan sebuah ekspedisi Palang Merah di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai *Mission of the Netherlands Red Cross* (Van Bergen, 2013: 218-219).

Dipihak yang lain, W.F. Wertheim yang menjabat sebagai Sekretaris Palang Merah Batavia mampu menjalin kontak dengan Palang Merah Belanda dan Palang Merah Internasional. Dia merasa kerja Palang Merah Batavia terbatas dan kurang efisien, sehingga dibutuhkan perlu dibentuk Komite Pusat Palang Merah Hindia Belanda (NIRK). Selain itu, Wertheim menginginkan agar Palang Merah yang akan didirikan memiliki wilayah kerja luas, organisasinya terstruktur, dan lepas dari pengaruh politik. Dalam hal tersebut, Wertheim tidak bekerja sendirian, dia bekerja sama dengan H.J. Spit, mantan Presiden NIRK dan wakil *Volksraad*, memperjuangkan pembentukan kembali NIRK (Van Bergen, 2013: 218-219).

Di pihak yang lain, pada tanggal 17 November 1945, Deputy Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sekaligus Kepala NICA, N.S. Blom, mengajukan permintaan untuk mendirikan kembali Komite Pusat Sementara Palang Merah Hindia Belanda. Dia mengungkapkan bahwa NIRK diperlukan untuk menjalin kontak dengan lembaga di luar Hindia Belanda, seperti Palang Merah Belanda (NRK), Palang Merah Inggris, perwakilan Palang Merah di Washington, dan Palang Merah Internasional. Dalam surat tersebut, Blom menyarankan agar NIRK memiliki 3 pelayanan, yaitu layanan informasi, layanan keluar masuknya barang bantuan, dan layanan medis. Dia juga

3) Salah satunya, Graus, Kepala Divisi Transportasi, diculik dan dibunuh oleh Pemuda. Kejadian serupa banyak terjadi sepanjang periode Revolusi. (Lihat, Rode Kruis Batavia, 1945: 1-2).

menekankan agar NIRK mampu menjadi penghubung antara pemerintah Hindia Belanda, *Recovery Allied Prisoner of War and Internees* (RAPWI), dan NRK. Dalam poin nomor empat, Blom menegaskan bahwa untuk saat ini Komite Pusat Sementara NIRK hanya akan mengambil orang-orang non-Indonesia sebagai anggotanya.⁴

Dalam perkembangannya, Komite Pusat Palang Merah Hindia Belanda didirikan kembali pada tanggal 31 Desember 1945. Beberapa pengurusnya berasal dari anggota Palang Merah Batavia. Adapun pekerjaan yang telah dilakukan oleh Palang Merah di Batavia diakui sebagai pekerjaan NIRK. Adapun susunan Komite Pusat NIRK diketuai oleh J. Ramaer, Sekretaris adalah Stibbe dan Anggota Komite Pusat NIRK adalah N. Hoekstra dan A. Zimmerman (Rode Kruis Batavia, 1945: 5).

Berdirinya Kantor Pusat *International Committee of the Red Cross* (ICRC) di Jakarta

Pekerjaan pertama ICRC di Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan militer Jepang adalah mengunjungi beberapa kamp internir guna mengatur pengiriman makanan dan pakaian kepada interniran. Kunjungan tersebut justru difasilitasi oleh militer Jepang, melalui pemberian bantuan dana, pemberian izin pengalihfungsian gedung milik Jepang untuk kepentingan ICRC, serta menyediakan kendaraan untuk mobilitas ICRC (ICRC, 1948: 504). Sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Militer Jepang merupakan tindaklanjut dari keputusan mereka tanggal 18 Agustus 1945, yang menyatakan bersedia membantu pekerjaan ICRC dalam rangka pembebasan dan repatriasi tawanan perang yang berada di seluruh wilayah Jajahannya (Elena Bosch, 2012: 28).

Pada tahun 1945, Palang Merah Batavia dan Palang Merah Indonesia sama-sama berusaha untuk menjalin kerja sama dengan ICRC. Sampai dengan bulan September 1945, hanya Palang Merah Batavia yang diakui eksistensinya oleh ICRC Jenewa (Rode Kruis Batavia, 1945: 2). Namun demikian, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Memasuki bulan Oktober-November 1945, kondisi keamanan Indonesia semakin memburuk. Bagi pihak Republik, kondisi tersebut justru membuka jalan diakuinya eksistensi PMI oleh ICRC. Hal itu dibuktikan oleh surat permintaan bantuan yang dikirimkan ICRC kepada PMI untuk melakukan intervensi konflik di Indonesia (PMI, 1953: 5). Permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh ICRC melalui pengiriman dua delegasinya dari Jenewa ke Jawa. Pada akhir tahun 1945, ICRC mendirikan Kantor Pusat Delegasi ICRC di Jakarta (ICRC, 1948: 504).

4) Aanteekeningen betrefende De Voorloopige Organisatie van het Centrale Comite van het Nederlandsch Indische Roode Kruis', tanggal 20 November 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1718.

Hadirnya delegasi ICRC Batavia membawa banyak arti bagi eksistensi Indonesia dalam konflik perebutan kedaulatan. *Pertama*, ICRC mampu tampil sebagai penghubung antara pihak Belanda dan pihak Indonesia, meskipun sebatas lingkup kerja Palang Merah. *Kedua*, eksistensi negara Republik kembali mendapatkan pengakuan, yaitu melalui perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan ICRC. *Ketiga*, hadirnya ICRC merupakan langkah Palang Merah untuk mengawasi pelaksanaan poin-poin utama Konvensi Jenewa, yaitu perlindungan terhadap korban perang. Namun demikian, hadirnya ICRC tidak selalu disambut oleh sikap positif Pemuda. Salah satu yang menyatakan kecurigaan tersebut adalah Roeslan Abdulgani. Dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa *intercross* merupakan basis persembunyian kaum interniran yang hendak mendirikan NICA (Roeslan Abdulgani, 1961: 12).

Kehadiran Palang Merah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan politik. Selain sebagai lembaga kemanusiaan, lembaga Palang Merah memiliki peran terselubung, yaitu untuk menegaskan eksistensi kedua pemerintahan yang sedang berkonflik. Pengakuan Internasional menjadi poin utama yang berusaha mereka bangun melalui berdirinya masing-masing Palang Merah, karena menurut konvensi Jenewa, hanya negara yang “sah” yang berhak mendirikan Palang Merah Nasional. Dalam hal ini, ICRC bersikap dilematis, karena bersedia menjalin kerjasama dengan kedua pemerintahan yang sedang berkonflik, dengan kata lain seakan melegalkan kedua lembaga Palang Merah.

Palang Merah di Medan Pertempuran

Perebutan kedaulatan antara pihak Republik dengan pihak Belanda menciptakan konflik berdarah yang tidak mudah diselesaikan. Tidak hanya pertempuran terbuka, tetapi tindakan saling tawan, penculikan, dan perampokan terjadi hampir di sepanjang periode. Kekacauan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengakibatkan ribuan orang menjadi korban. Dalam periode ini, Palang Merah banyak dikirim ke wilayah-wilayah rawan konflik, termasuk di *front* pertempuran. Status istimewa yang melekat dalam tubuh Palang Merah, serta kemampuan penguasaan bantuan medis menyebabkan mereka menjadi salah satu lembaga yang paling dibutuhkan selama pertempuran.

Selama masa Revolusi Indonesia, sedikitnya terdapat tiga institusi Palang Merah yang bekerja di *front*, di antaranya PMI, *Nederlandsche Roode Kruis afdeeling Indonesië* (NERKAI)⁵, dan ICRC. Namun, tulisan ini lebih

5) Nama NERKAI baru digunakan oleh pihak Belanda pada tahun 1946. Sebelumnya, Palang Merah ini bernama NIRK (*Nederlandsche Indies Roode Kruis*). Berdasarkan penelitian Leo van Bergen, pergantian nama tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan NERKAI dengan penduduk Indonesia, karena golongan pribumi cenderung lebih mudah menerima bantuan dari pihak yang mencantumkan nama “Indonesia”. Perlu diberikan catatan, proses pergantian nama ini bersamaan dengan proses demiliterisasi NERKAI (Lihat, Leo van

banyak menjelaskan peran PMI saja, karena NERKAI dan *Intercross* cenderung ditugaskan di luar *front*, khususnya untuk mengurus *Allied Prisoner of War and Internees* (APWI) (Het Officieel Orgaan van het Nederlandse Rode Kruis afd. Indonesië, edisi 04, April 1947: 2-3). Dalam beberapa kejadian, NERKAI dan ICRC justru menghentikan aktivitasnya di wilayah-wilayah rawan konflik. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan personil NERKAI dan ICRC yang mayoritas orang Indo-Eropa dari teror Pemuda (Kalgorie Miner, 18 Oktober 1945: 3).

Pada awal kemerdekaan, Pemuda memiliki sentimen rasial terhadap orang kulit putih. Mereka melakukan perampokan, penculikan, hingga pembunuhan terhadap orang-orang kulit putih. Selain alasan tersebut, program demiliterisasi yang dilakukan dalam tubuh NERKAI pada akhir tahun 1946 mengurangi keterlibatan mereka di *front*. Dalam surat yang dikirim S.H. Spoor kepada Letnan Gubernur Jendral Batavia, dia menginginkan agar pekerjaan NERKAI (*mobile colonnes*) hanya sebatas personel kesehatan cadangan di *front*, tidak lagi menyerupai peran *Militaire Geneeskundigde Dienst* (MGD).⁶ Dengan demikian, PMI tampil sebagai lembaga Palang Merah yang paling mendominasi dalam pekerjaan medis di *front*.

Selama masa Perang Kemerdekaan Indonesia, definisi PMI cukup kabur. Corak personel dan latar belakang anggota PMI mirip dengan anggota NERKAI, yaitu saling beririsan antara petugas medis dengan militer. Dalam aspek struktur, penulis mengalami kesulitan untuk memetakan lembaga Palang Merah mana yang berada di bawah komando resmi PMI, dan lembaga mana yang tidak berafiliasi resmi dengan PMI. Dalam praktiknya, laskar-laskar memiliki kesatuan Palang Merahnya masing-masing, melakukan pekerjaan Palang Merah, dan mengenakan simbol Palang Merah. Mereka juga bertanggung jawab terhadap pelayanan medis di medan perang.

Anggota PMI berasal dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran maupun non-pendidikan kedokteran, yang meliputi “golongan terlatih” dan golongan “tidak terlatih”. Golongan terlatih adalah anggota PMI yang pada masa kolonial atau masa Pemerintahan Militer Jepang menjadi anggota NIRK, anggota kepanduan, atau organisasi para militer yang mendapatkan pelatihan EHBO. Sedangkan golongan “belum terlatih” merupakan sukarelawan PMI yang sama sekali belum pernah diberikan pelatihan EHBO. Untuk mengatasi hal tersebut, pada awal kemerdekaan banyak diadakan pelatihan-pelatihan EHBO dan dasar

Bergen, 2013: 227).

6) Dalam Surat yang disampaikan kepada Letnan Gubernur Jenderal di Batavia, S.H. Spoor mendesak agar NIRK segera mengadakan reorganisasi karena NIRK dinilai terlalu militeristik. “KNIL: Status Roode-Kruis personeel in Nederlandsch Indie” dan “KNIL: Memorie van Toelichting”, tanggal 19 Desember 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1716.

kemiliteran bagi penduduk. Harapannya, mereka dapat ditarik sebagai anggota laskar dan/atau sukarelawan PMI (*Merah Putih*, 2 November 1945: 2; Matia Madjiah, 1986: 88).

Tingginya permintaan tenaga kesehatan di masa perang mendorong PMI merekrut setiap orang yang dirasa cakap dan bersedia diajari EHBO. Poster, pengumuman, dan pemberitaan tentang pembukaan sukarelawan PMI tersebar di berbagai daerah. Dalam beberapa peristiwa, sukarelawan PMI diminta untuk menjadi bagian dari divisi kesehatan laskar. Sebagai contoh di Semarang, Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) menyebarkan brosur yang isinya ajakan kepada dokter dan petugas PMI untuk masuk menjadi anggotanya.⁷ Di Bandung, Laskar Wanita (LASWI) yang baru didirikan pada tanggal 10 Oktober 1945 segera mengadakan pelatihan EHBO bagi anggotanya. Pelatihan itu dilakukan oleh mantan anggota *Fujinkai*, dokter, dan anggota PMI. Di Surakarta, laskar Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) dan Laskar Puteri Indonesia (LPI) juga melakukan hal sama. Secara umum, pelatihan-pelatihan tersebut meliputi teknik membalut luka, teknik perawatan di Rumah Sakit, dan ketrampilan mengenai obat-obatan. Selain pelatihan medis, mereka juga diberikan pelatihan kemiliteran (Ohorella dkk, 1992: 77).

Pelayanan PMI di *front* terbagi menjadi dua strategi, yaitu mendirikan Pos PPPK, dan membentuk *divisi mobile-colonnes*. Kedua strategi tersebut diaplikasikan menyesuaikan kebutuhan di *front*. Contoh penerapan strategi *pertama* diterapkan di Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya di mana 200an sukarelawan PMI bersama Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) mendirikan beberapa Pos PPPK di berbagai titik di *front*. Mereka memainkan peran sebagai distributor obat-obatan serta penghubung komunikasi antara CBZ Surabaya, PMI, dan *front*. Dalam perkembangannya, PMI-PPRI diminta oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Surabaya untuk menjadi prajurit kesehatan, dengan nama “Korps Palang Merah Putri”. Tugas “Korps Palang Merah Putri” adalah memberikan pertolongan pertama terhadap korban pertempuran, yang terdiri dari tentara, laskar, dan juga pengungsi (Irna Hanny, 1995: 92-94 dan Ohorella dkk, 1992: 77).

Strategi *kedua*, PMI bersama dengan laskar-laskar atau militer membentuk divisi *mobiele-colonnes*. Umumnya, dalam satu divisi *mobiele-colonnes* terdapat satu orang dokter yang mengkoordinasi pertolongan medis di *front*. Sebagai contoh di *front* Karawang-Bekasi, anggota divisi *mobiele-colonnes* PMI merupakan murid *Ikadaigaku*, Divisi ini mengikuti ke arah mana laskar atau militer bergerak, mengangkut dan mengobati korban yang terluka, serta mengangkut korban ke tempat perawatan di luar *front*, serta membuat

7) Laporan Mr. K.A. de Weerd, “Repport afd. 1-3 (Persresearch)”, tanggal 12 Februari 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

kuburan massal bagi pasukan yang tewas. Dalam melakukan tugasnya, petugas *mobile colonnes* tidak luput dari serangan Sekutu, meskipun telah mengenakan simbol Palang Merah (Mona Lohanda, 1986: 76-79; lihat pula, Irna Hanny, 1995: 92-107).

Selain fungsi medis di *front*, PMI juga bertanggung jawab dalam tindakan perawatan lanjutan di luar *front*, baik di Pos PMI maupun di Rumah Sakit. Perawatan lanjutan meliputi pemberian obat, rawat inap, hingga operasi bedah. Selama periode Perang Kemerdekaan Indonesia, pasukan medis, termasuk PMI, dituntut untuk dapat melakukan penyembuhan dalam segala hal, mulai dari pengobatan “penyakit rakyat” hingga tindakan bedah.

Pukulan berat bagi eksistensi PMI terjadi pada saat Agresi Militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan militernya ke Ibu Kota Republik, di Yogyakarta. Dalam serangan tersebut, pasukan Belanda dapat menguasai kota, menahan Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan beberapa anggota kabinet Republik lainnya (Kahin, 2013: 427). Selain pejabat pemerintahan Republik, beberapa pegawai Kantor Pusat PMI dan pegawai PMI cabang Yogyakarta juga ikut ditawan, di antaranya dr. Diapari (Sekjen PMI Pusat), Paramita Abdurahman (Kepala Bagian Informasi), Harsoedi, Kosasih Kartasasmita (Anggota Kantor Pusat PMI), dr. Poerwohoesodo (Ketua PMI cabang Yogyakarta). Dalam peristiwa tersebut, aktivitas PMI cenderung dilumpuhkan. Usaha pembebasan anggota PMI dipersulit, karena PMI dianggap sebagai tempat persembunyian tentara dan gerilyawan Republik (PMI, 1953: 26).⁸ Selain itu, Pandangan Internasional yang menganggap Republik telah “habis” menyebabkan minimnya bantuan dari Internasional kepada PMI. Dengan “vakum” nya Pemerintahan Republik, secara otomatis PMI dianggap tiada.

Pola pekerjaan serupa juga dilakukan oleh Belanda dan Sekutu. Selama periode awal Perang Kemerdekaan, NIRK membuat divisi *mobile-colonnes* untuk mendistribusikan obat, pakaian, dan makanan bagi penduduk Indo-Eropa di Jakarta dan sekitarnya, khususnya bagi mereka yang masih terjebak

8) Namun, penahanan orang-orang Republik tidak bertahan lama, beberapa dari mereka kemudian dibebaskan, salah satunya dr. Diapari. Dengan segera, dr. Diapari bergerak untuk mengatasi posisi tidak menguntungkan PMI. Dia berhasil mengeluarkan seruan yang mampu menggerakkan berbagai pihak untuk memusatkan perhatian mengenai kesengsaraan di Jawa, bahkan berhasil menggerakkan penggalangan bantuan bagi PMI. Akhirnya, pada 10 Januari 1949, dibentuk panitia aksi pengumpulan uang dan pakaian di Jakarta. Badan tersebut diketuai oleh Tan Tjong Tjoa. Bantuan tersebut kemudian dibagi rata kepada PMI dan NERKAI. Wilayah-wilayah luar Jawa juga segera merespons seruan dr. Diapari melalui aksi bantuan kepada PMI, di antaranya dari Badan Penolong Kesengsaraan Banjarmasin (melalui perantara *Intercross*), Panitia Aksi Pengumpulan Derma di Samarinda, dan tokoh-tokoh NIT (Negara Indonesia Timur). Dari luar Indonesia, PMI juga menerima bantuan dari Singapura. Bantuan yang diberikan kepada PMI pasca Agresi Militer II menunjukkan bahwa PMI masih dianggap sebagai institusi Palang Merah yang diakui, baik dalam negeri maupun Internasional.

di dalam kamp interniran⁹ Di Semarang, *Regerings Voorlichting-Dienst* (RVD) melaporkan bahwa sebelum Pertempuran Lima Hari Semarang orang Indo-Eropa rutin mendapatkan bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan dari Divisi *Mobiele-Colonnes* Palang Merah.¹⁰ Kejadian serupa juga terjadi di Surabaya. Antara bulan Agustus-akhir Oktober 1945 Palang Merah Surabaya dipimpin oleh Ir. Keller mendirikan dapur umum, mendistribusikan obat-obatan, makanan, dan pakaian bagi orang Eropa, serta mendirikan kantor penerangan. Namun, pada akhir Oktober 1945 kondisi Surabaya semakin memburuk, sehingga Palang Merah Surabaya menghentikan aktivitasnya (*Officieel Orgaan van het Nederlandse Rode Kruis afd. Indonesië, 2e Jaargang, No. 6, Desember 1948: 18-19*).

Selama periode awal kemerdekaan, *mobiele-colonnes* yang dibentuk oleh NIRK berada di bawah naungan *Recovery of Allied Prisoners of War and Internees* (RAPWI). Mereka juga bekerja sama dengan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dan *Dutch Female Navy Nurses*. Umumnya, Divisi *Mobiele-Colonnes* NIRK beranggotakan sekitar 4-17 orang, yang meliputi dokter, perawat, asisten perawat, ahli obat-obatan, *male helper*, dan sekretaris. Pada dasarnya, divisi ini bergerak di belakang tentara Sekutu, tetapi di akhir 1945 hingga awal 1946, mereka diizinkan untuk bekerja langsung di barisan depan (Van Bergen, 2013: 224-225). Namun, sumber yang diperoleh oleh penulis tidak cukup kuat untuk mendukung pernyataan tersebut. Berdasarkan pembacaan berbagai sumber, petugas NIRK (*mobiele colonnes*) justru cenderung menghindari wilayah *front*, karena dianggap membahayakan kelangsungan hidup anggotanya.

Selama awal Agresi Militer II, perwakilan NERKAI, S.v. Schie, mengungkapkan bahwa NERKAI masih mempertimbangkan untuk mengirimkan petugasnya ke Yogyakarta, karena mereka masih difokuskan untuk melakukan tugas di wilayah Semarang.¹¹ Tidak berselang lama dari surat tersebut, S.v. Schie menemui ketua PMI, dr. Diapari untuk menawarkan kerja sama. Konsekuensinya, anggota PMI harus memiliki kartu anggota yang dicap oleh NERKAI dan *Inlichtingen voor Geheim Dienst* (PMI, 1953: 27). Proses "*screening*" dimaksudkan agar PMI bersih dari aliran politik yang dapat merugikan Belanda. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa NERKAI tidak berdiri sederajat dengan PMI, bahkan cenderung mencurigai PMI.

9) Laporan RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees*), "Deppok Rapport", Oktober 1945. ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 153.

10) Laporan RVD, "Rapport inzake situatie Semarang", tanggal 28 Januari 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1242.

11) Laporan perjalanan S.v. Schie, "Rapport omtrent reis van Hr. S.v. Schie naar Djocja", tanggal 25 Desember 1948, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1719.

Selama pendudukan Belanda atas Ibu Kota Republik, PMI bekerja secara “legal” di bawah lembaga NERKAI.

Penyalahgunaan Fungsi Palang Merah

Seperti yang telah disinggung paragraf sebelumnya, prinsip utama Palang Merah adalah netralitas. Dalam peperangan, prinsip tersebut hampir mustahil untuk diaplikasikan. Arah kebijakan Palang Merah tidak bisa dilepaskan begitu saja dari intervensi politik negara yang sedang bertikai. Posisi “netral” yang melekat dalam tubuh institusi Palang Merah sering dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memuluskan strategi militernya guna memenangkan perebutan kedaulatan.

Dalam Konvensi Jenewa Pertama, anggota Palang Merah tidak boleh diganggu, ditangkap, dan diserang oleh militer. Pihak-pihak yang sedang terlibat konflik diperintahkan untuk mendukung dan memfasilitasi pekerjaan Palang Merah. Namun, status istimewa yang melekat dalam tubuh Palang Merah justru banyak dimanfaatkan oleh institusi negara sebagai kedok dalam mendapatkan simpati internasional. Terlebih lagi, “mobilisasi bebas” yang dapat dilakukan anggota Palang Merah untuk keluar masuk wilayah “musuh” dimanfaatkan oleh polisi-militer untuk masuk ke dalam tubuh Palang Merah.

Beberapa catatan intelijen antara bulan Oktober 1945–Februari 1946 mengungkapkan bahwa PMI menyalahgunakan statusnya sebagai institusi yang netral untuk mendukung strategi militer Republik. NEFIS mencatat bahwa berbagai Rumah Sakit, Pos PMI, Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta merupakan tempat penyimpanan senjata dan tempat berkumpulnya Pemuda. Beberapa Rumah Sakit dan Pos PMI yang diindikasikan oleh NEFIS sebagai pihak yang tidak netral adalah Rumah Sakit CBZ Jakarta¹², Rumah Sakit Duri¹³, Rumah Sakit Pintu Besi¹⁴, Rumah Sakit Palang Merah Kramat¹⁵, Pos PMI Bukit Duri¹⁶, dan Pos PMI Jatinegara.¹⁷ Sementara itu, Pos PMI Sumenep

12) NEFIS, EC6/20190/G, tanggal 26 November 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

13) NEFIS, EC6/21027/G, tanggal 16 Desember 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

14) NEFIS, EC6/20224/G, tanggal 28 November 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

15) NEFIS, EC6/20706/G, tanggal 7 Desember 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

16) NEFIS, “23 Ind. Div. Misc. Reports”, EC6/22483/G, tanggal 18 Januari 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

17) NEFIS, EC6/20160/G, tanggal 27 November 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor

di Menteng juga diindikasikan sebagai markas orang-orang nasionalis.¹⁸ NEFIS juga mencatat bahwa beberapa *mobile-colonnes* yang digunakan oleh PMI difungsikan untuk mengantarkan persenjataan bagi pasukan Republik. Dalam sebuah peristiwa pengeledahan yang dilakukan oleh pasukan Sekutu, mereka menemukan beberapa granat di dalam *mobile-colonnes* yang baru saja keluar dari Pos PMI Kramat. Laporan tersebut menceritakan bahwa pasukan Republik memanfaatkan Pos PMI yang berada di dekat kamp interniran sebagai tempat persembunyiannya, bahkan mereka melakukan serangan dari dalam *mobile-colonnes* dan pos PMI.¹⁹

Pada umumnya, pola serangan pemuda adalah “*hit and run*”. Setelah melakukan penyerangan, kelompok Pemuda yang terdiri dari mahasiswa kedokteran, pegawai CBZ, dan pegawai opium akan masuk ke Rumah Sakit CBZ dan menyamar sebagai dokter atau pasien.²⁰ Sementara itu, penyelundupan senjata dari dan ke CBZ dilakukan melalui selokan yang berada di belakang Rumah Sakit. Selain itu, suplai senjata untuk Pemuda juga sering kali diangkut menggunakan kendaraan PMI.²¹ Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata, CBZ juga dijadikan tempat perakitan gas beracun. Senjata itu dirakit oleh pegawai CBZ dan mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran.²²

Pasca Agresi Militer II, van Lier mengirimkan surat kepada pimpinan NERKAI di Jakarta tentang kondisi pertempuran di Yogyakarta. Dalam surat tersebut diungkapkan bahwa banyak pasukan TNI bersembunyi di Pos PMI Sitihinggil. Oleh karena itu, van Lier mendesak agar NERKAI membersihkan dan membubarkan Pos PMI tersebut.²³ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasca Agresi Belanda II, PMI bekerja di bawah kontrol NERKAI

Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

18) NEFIS, EC6/20497/G, tanggal 3 Desember 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

19) NEFIS, “Nefis Rapport”, No. EC6/19420, tanggal 30 September 1945, “Batavia – 23 Ind.Div.”, tanggal 22 Desember 1945, dan “Ondervragingsrapport”, No. HK/92/EO, tanggal 2 Februari 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1733.

20) Laporan NEFIS, “Buitenkantoor Rapport”, tanggal 11 Desember 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1733.

21) NEFIS, “Uittreksel Rapport AMACAB Intell”, tanggal 21 Desember 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1733.

22) NEFIS, “Uittreksel Rapport AMACAB Intell”, tanggal 31 Desember 1945, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1733.

23) Laporan van Lier, “Incident te Jogja”, tanggal 19 Februari 1949, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1719.

dan pemerintah Belanda. Konsekuensinya, NERKAI dapat mengintervensi setiap pos PMI yang dianggap mencurigakan.

Di sisi lain, Palang Merah pihak Eropa juga tercatat melakukan pelanggaran dengan pola yang hampir sama. Pada tanggal 7 Desember 1945, Surat Kabar Merdeka menulis sebuah artikel mengenai peran *mobile-colonnes* Palang Merah Batavia yang melakukan penyelundupan senjata bagi pasukan Sekutu di wilayah pertempuran. Dalam beberapa kejadian, Palang Merah Batavia bekerja sama dengan RAPWI untuk mempersenjatai tawanan perang yang baru saja dibebaskan dari kamp.²⁴

Dalam aspek lain, Palang Merah juga memainkan peran propaganda bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam program demiliterisasi yang dilakukan NIRK pada akhir 1946, SH. Spoor secara gamblang menjelaskan bahwa reorganisasi NIRK ditujukan untuk menarik simpati penduduk Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa NIRK sudah terlalu militeristik, banyak anggota NIRK merupakan personel militer, sehingga menyulitkan posisi NIRK di mata pribumi. Untuk mengatasinya, NIRK harus dikembalikan sebagai lembaga sipil Palang Merah, yang netral dan tidak diintervensi oleh militer. Tahap pertama program ini adalah penggantian nama NIRK menjadi NERKAI (*Nederlandsche Roode Kruis afdeeling Indonesië*). Pencantuman nama “Indonesia” dalam lembaga NERKAI dan penyusunan program yang berusaha menghindari aspek-aspek militeristik diharapkan mampu mendekatkan NERKAI dengan Penduduk pribumi. Dengan kata lain, NERKAI ditegaskan sebagai lembaga sipil yang dijadikan sebagai media propaganda pihak Belanda, dalam rangka memenangkan perebutan kedaulatan di Indonesia.²⁵

Selain itu, kedua institusi Palang Merah juga dilibatkan dalam tugas intelijen di bawah komando tentara atau laskar. Pada akhir September 1945, AMRI Semarang menyebarkan brosur perekrutan anggota, salah satu tujuannya untuk membentuk divisi Palang Merah. Berdasarkan catatan pihak Belanda, divisi Palang Merah itu akan ditugaskan untuk melakukan spionase terhadap aktivitas Sekutu.²⁶ Dalam memoar Awalludin Latief, juga diceritakan

24) Red Cross Batavia, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1725. “Surat yang ditulis oleh Ketua Palang Merah Batavia, Guthwirth, kepada Philip Christison (Komandan AFNEI) tentang artikel yang ditulis oleh Surat Kabar Merdeka 7 Desember 1945”, tanggal 12 Desember 1945. Dalam surat kabar tersebut, pihak Indonesia menanyakan “mengapa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Palang Merah Eropa tidak pernah mendapat perhatian Dunia atau Pemerintah Inggris?”

25) Surat S.H. Spoor kepada Letnan Gubernur Jendral di Batavia, “Memoire van Toelichting”, tanggal 19 Desember 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942 – 1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1716.

26) Laporan K.A. de Weerd, “Rapport afd. 1 – 3 (Persresearch)”, tanggal 12 Februari 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands – Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942 – 1950*, Nomor Inventaris RA.3a, Nomor Arsip 1733. Tugas spionase yang ditugaskan kepada divisi Palang Merah juga dilakukan oleh badan-badan

bahwa dia bersama 3 orang temannya berpakaian dokter dan menggunakan ban Palang Merah untuk melakukan intelijen di wilayah pendudukan Belanda di Bukittinggi. Pada saat dia dihadang oleh pasukan Belanda, dia menjelaskan bahwa dirinya merupakan dokter dan pegawai Palang Merah yang ditugaskan untuk membasmi wabah cacar di Bukittinggi (Awaludin Latief, 1997: 36-49).

Selama periode Revolusi, PMI juga sering dimanfaatkan sebagai “kurir” pengiriman informasi propaganda pihak Republik. Di Pasar Ikan Jakarta, tiga buah tas dengan label PMI di sita oleh militer Belanda setelah di dalamnya ditemukan buku-buku, brosur, serta berlembar-lembar tulisan propaganda yang dicurigai Belanda dapat menghasut pribumi.²⁷ Dalam tas tersebut, tertulis “siaran kilat” yang memuat perintah militer Republik untuk menyingkirkan pasukan Jepang dan Indo-Eropa. Buku-buku yang berada di dalam tas tersebut banyak berisi tulisan-tulisan Tan Malaka beserta arah politiknya, karya-karya Sjahrir, dan Hatta.²⁸

Lain daripada itu, terdapat pula anggota PMI yang bekerja untuk militer Belanda. Dalam surat kabar *Antara* tanggal 20 Maret 1947, diberitakan bahwa Halimah, petugas Rumah Sakit PMI Bandung, divonis 18 tahun penjara karena menjadi mata-mata Belanda. Dalam sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Tentara Garut, Halimah didakwa atas kegiatannya membocorkan informasi kepada militer Belanda mengenai kondisi pertahanan TRI beserta pabrik senjatanya di Garut (*Antara*, 20 Maret 1947).

Beberapa contoh kecurigaan dan penyalahgunaan yang melibatkan lembaga Palang Merah memang tidak bisa dihindari selama masa perang. Status istimewa yang melekat dalam tubuh Palang Merah justru membuka peluang bagi pihak militer untuk melakukan spionase dan penyelundupan logistik militer. Terlebih lagi, institusi nasional yang melekat dalam tubuh kedua Palang Merah sangat potensial untuk disusupi kepentingan politik.

Selama periode revolusi, PMI dan NERKAI sama-sama bekerja atas nama kemanusiaan untuk menolong korban pertempuran. Pola mobilisasi kedua Palang Merah sama, yaitu bergerak di belakang pasukan militer masing-masing pihak. Namun, dalam setiap kondisi perang tersebut, sisi keberpihakan mustahil untuk dihindari. Sampai dengan tulisan ini ditulis, penulis belum menemukan bukti bahwa PMI menolong pasukan Belanda yang terluka di *front*, begitu juga sebaliknya. Pola bantuan yang “murni” tidak mempertimbangkan latar belakang ras dan kebangsaan hanya mewujud dalam bantuan kepada golongan sipil, seperti internir dan pengungsi. Dari pihak

kepanduan dan organisasi kelaskaran wanita.

27) ICRC, “Misbruik van Roode Kruis-symbool”, tanggal 25 Juli 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands – Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942 - 1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

28) NEFIS, “Misbruik van Roode Kruis-symbool: Verslag”, 1946, ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.

PMI, bantuan kemanusiaan yang dilakukan di *front* merupakan bagian dari perjuangan Republik mempertahankan kedaulatan. Bagi NERKAI, pekerjaan di *front* justru cenderung dihindari. Mereka lebih aktif mendirikan pos NERKAI di wilayah yang baru saja mereka kuasai. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa kehadiran NERKAI di tengah-tengah penduduk digunakan untuk mendapatkan simpati pribumi.

Kesimpulan

Palang Merah di Indonesia tidak hanya memiliki fungsi medis dan kemanusiaan. Dalam konteks perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pihak pemerintah Republik Indonesia dan pihak pemerintah Belanda sama-sama memanfaatkan lembaga Palang Merah, PMI dan NERKAI, sebagai salah satu alat perjuangan untuk mencapai kepentingan politik masing-masing kubu negara. Sifat organisasi PMI yang “netral” dimanfaatkan oleh pihak Republik untuk menjalankan misi politis strategis sehingga meleburkan kenetralan lembaga kemanusiaan itu sendiri. Data sejarah menyebutkan empat faktor utama yang menyebabkan ketidaknetralan pada PMI dan NIRK/NERKAI. *Pertama*, status istimewa Palang Merah. Posisi fleksibel dan kebal hukum yang disandang oleh Palang Merah tersebut menjadikan keduanya sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai petugas medis yang memainkan peran sebagai agen spionase dan kurir senjata kedua institusi militer yang bertikai. *Kedua*, kaburnya prinsip independen Palang Merah. Sebagai sebuah lembaga Palang Merah yang diproyeksikan menjadi Palang Merah Nasional, baik PMI maupun NERKAI dituntut untuk tunduk dan sejalan dengan hukum, peraturan serta garis besar pemerintahan yang menaunginya. Namun demikian, mereka juga diharuskan menjadi pihak netral yang memiliki otonomi sendiri berdasarkan garis besar Konvensi Jenewa. Dualisme tersebut menyulitkan posisinya sebagai lembaga independen. Dalam praktiknya, kedua Palang Merah cenderung mengutamakan kepentingan negara daripada menegakkan prinsip Palang Merah Internasional. *Ketiga*, kuatnya sentimen nasionalisme. Apabila mengacu pada Konvensi Jenewa Pertama, Palang Merah dalam skala Nasional hanya boleh ada satu bagi setiap negara, serta hanya dapat diajukan dan dimiliki oleh sebuah negara yang sudah berdaulat. Berkaitan dengan hal itu, berdirinya kedua Palang Merah dapat diartikan sebagai langkah politis kedua negara untuk memperkuat posisinya sebagai pihak yang berdaulat di Indonesia. Bagi pihak Republik, PMI sering dimanfaatkan sebagai alat diplomasi dengan dunia internasional. Di pihak lain, Belanda juga membutuhkan penguatan posisinya sebagai pemerintahan yang sah dan berdaulat di Indonesia. Sejak awal berdirinya kembali, program bantuan yang diberikan NERKAI kepada penduduk pribumi dirancang untuk menciptakan sebuah hubungan ketergantungan bagi penduduk Indonesia kepada pihak Belanda. Dalam pada itu, penulis setuju dengan

hipotesis Leo van Bergen yang menyatakan bahwa NERKAI merupakan instrumen kesehatan negara Belanda yang memainkan fungsi politis sebagai alat pasifikasi pemerintah Belanda guna menunjukkan kembali eksistensi negara kolonial. Selain itu, eksistensi NERKAI di Indonesia menjadi media alternatif yang menguatkan posisi Belanda di mata Internasional. *Keempat* kuatnya nuansa militerisme Palang Merah. Hal itu disebabkan oleh status ganda keanggotaan Palang Merah, yaitu antara petugas medis dan bagian dari tantara/para militer. Selain itu, pola mobilisasi di *front* yang menyerupai Divisi Kesehatan Militer adalah aspek lain yang mendorong kaburnya prinsip netralitas Palang Merah. Dalam hal ini, Palang Merah juga ikut menyepakati definisi “kawan” dan “lawan” dalam artian politik. Tentu saja, pola-pola seperti itu tidak sejalan dengan prinsip *impartial* lembaga Palang Merah, yang menekankan pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada semua golongan tanpa diskriminasi.

Dengan mengungkapkan peran Palang Merah, gambaran historis tentang Perang Kemerdekaan Indonesia menjadi berbeda. Hadirnya aspek humanis selama Perang Kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa peperangan tidak hanya persoalan membunuh dan menyakiti, tetapi juga menyelamatkan dan mengobati. Muncul dan berkembangnya gerakan Palang Merah di Indonesia masa perang membuktikan bahwa proses perebutan kedaulatan tidak hanya didominasi oleh instrumen politis-militer, tetapi juga melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk sukarelawan PMI dan NERKAI. Mereka sama-sama penting dan sama-sama berpengaruh bagi terciptanya berbagai kondisi selama periode 1945-1949.

Referensi

Arsip

- ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1718.
- ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1716.
- ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1733.
- ANRI. *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 153.
- ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1242.
- ANRI, *Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950*, Nomor Inventaris RA. 3a, Nomor Arsip 1719.
- NA. NEFIS, “Nefis Rapport”, No. EC6/19420, tanggal 30 September 1945, “Batavia – 23 Ind.Div.”, tanggal 22 Desember 1945, dan “Ondervragingsrapport”, No. HK/92/EO, tanggal 2 Februari 1946
- NA. NEFIS, EC6/20190/G, tanggal 26 November 1945
- NA. NEFIS, EC6/20160/G, tanggal 27 November 1945

- NA. NEFIS, EC6/20224/G, tanggal 28 November 1945
 NA. NEFIS, EC6/20497/G, tanggal 3 Desember 1945
 NA. NEFIS, EC6/20706/G, tanggal 7 Desember 1945
 NA. NEFIS, "Buitenkantoor Rapport", tanggal 11 Desember 1945
 NA. NEFIS, EC6/21027/G, tanggal 16 Desember 1945
 NA. NEFIS, "Uittreksel Rapport AMACAB Intell", tanggal 21 Desember 1945
 NA. NEFIS, "Uittreksel Rapport AMACAB Intell", tanggal 31 Desember 1945
 NA. NEFIS, "23 Ind. Div. Misc. Reports", EC6/22483/G
 NA. NEFIS, "23 Ind. Div. Misc. Reports", EC6/22483/G, tanggal 18 Januari 194
 NA. NEFIS, "Misbruik van Roode Kruis-symbool: Verslag", 1946

Buku

- Awaludin Latief (1997). *Kisah nyata pada masa Revolusi: Kepahlawanan, Tragedi, Cinta, dan Pengorbanan*. Jakarta.
- Bosch, Elena. (2012). "The Role of Red Cross Aid in the Prisoners of War Camps on the Siam-Burma Railway", dalam *Research Papers, The British Empire at War Research Group No.2, Defence Studies Department, King's College London*.
- De Jong, L. (2002). *The Collapse of a Colonial Society*. Leiden: KITLV Press.
- Irna Hanny Nastoeti Hadi Soewito (1995). *Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi '45*. Jakarta: Grasindo.
- ICRC (1948). *Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during Second World War, 1 September 1939 – 30 June 1947: Volume I; General Activity*. Geneva.
- Kahin, George Mc. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Marwati Djoened (Ed.) (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942 – 1998*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Matia Madjiah (1986). *Kisah Seorang Dokter Gerilya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mona Lohanda (1986). *Perjuangan dan Pengabdian: mosaik kenangan Prof. Dr. Satrio 1916 – 1986*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ohorella, G.A., dkk. (1992). *Peranan wanita Indonesia dalam masa pergerakan nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Onghokham (2014). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- PMI (1953). *Sedjarah Palang Merah Indonesia (17 September 1945 – 31 Desember 1952)*. Djakarta: Markas Besar PMI Djakarta.
- R.Z. Leirissa, dkk. (1989). *Sejarah Pemikiran tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Rode Kruis Batavia (1945). *Verslag Der Werkzaamheden Gedurende de Periode Onmidellijk Volgende op de Japansche Capitulatie, (23 Augustus – 31 December 1945)*. Batavia: Rode Kruis.
- Roeslan Abdulgani (1961). *Api Revolusi di Surabaya*. Surabaya: Ksatria.
- Van Bergen, Leo (2013). "Medical care as the carrot: The Red Cross in Indonesia during the war of decolonization, 1945–1950", dalam *Medicine, Conflict, and Survival* 29, 3: 216-243.
- Van Bergen, Leo (2014). "On 'War Task' and 'Peace Work'. The Dutch East Indies Red Cross between the Colonial Wars and the Second World War", dalam *Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia* 66, 1: 1-11.

Von Roemer, L.S.A.M. (1922). *Report on the Dutch East Indies Section of the Nederlands Red Cross Society and Some Personal Ideas: with an aanexe upon the opium-policy in the Dutch East Indies*. Batavia: Javasche Boekhandle en Drukkerij.

Koran dan Majalah

Antara, 20 Maret 1947.

Het Nederlandsch-Indische "Roode Kruis" afd. Soerakarta, Roode Kruis Week. 1941.

Het Officieel Orgaan van het Nederlandse Rode Kruis afd. Indonesië, edisi 04, April 1947.

Kalgorie Miner, 18 Oktober 1945.

Merah Putih, 2 November 1945.

Officieel Orgaan van het Nederlandse Rode Kruis Afdeeling Indonesia. 2e Jaargang, No. 6, Desember 1948.

Suara Tjabang PMI, tjabang Djakarta, Juli 1953.

Soeara Merdeka, 25 Agustus 1945.